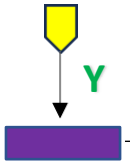
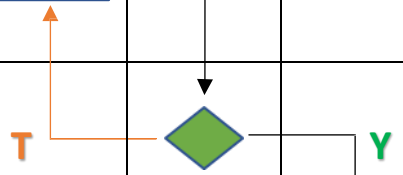
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	**W.31.OT.01.02 - 94**
	TANGGAL PEMBUATAN	**11 Maret 2025**
	TANGGAL REVISI	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	**11 Maret 2025**
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
	NAMA SOP	**Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 3. Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.01-01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Diskusi, Pameran, Konsultasi, dan Bantuan Hukum; 4. Surat Edaran Nomor PHN-05.HN.04.04 tahun 2017 tentang perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 5. Surat Edaran Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses rangkaian pembentukan Desa Sadar Hukum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
-	1. PC/Laptop; 2. ATK; 3. Printer/Scanner; 4. Proyektor/Screen; 5. Materi Pembinaan.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Pembentukan Desa Sadar Hukum akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.
		Kepala Desa/Lurah/Camat	ASN pelaksana tugas di bidang penyuluhan hukum	Bupati/ Walikota	Kepala Kantor Wilayah	Kepala BPHN	Gubernur	Menteri Hukum dan HAM RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerbitkan SK Kadarkum								Daftar anggota kadarkum, paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota	1 hari	SK Kadarkum	
2.	Pembinaan Kadarkum								a. Tempat (aula/balai desa) b. Materi Pembinaan Kadarkum c. Peralatan (laptop, proyektor, screen, meja, kursi, dan pegeras suara) d. Konsumsi	2 hari	Laporan kegiatan pembinaan Kadarkum	
3.	Penetapan Desa/Kelurahan Binaan								a. Laporan kegiatan pembinaan Kadarkum b. Surat permohonan penerbitan SK Desa/Kelurahan Binaan	7 hari	SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum	Y : Ya T : Tidak
4.	Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum								a. SK Kadarkum b. SK Desa/Kelurahan Binaan c. Laporan kegiatan pembinaan d. Piagam penghargaan	5 hari	Laporan kegiatan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5.	Pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum								Form kuesioner Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum	1 hari	a. Hasil pengisian kuesioner; b. Laporan penghitungan kuesioner;	
6.	Usulan verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum								Laporan hasil perhitungan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum	3 hari	Surat usulan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	
7.	Persetujuan hasil verifikasi usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum								Surat persetujuan usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari BPHN	5 hari	Surat permohonan penerbitan SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum	
8.	Penerbitan SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum								Surat permohonan penerbitan SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5 hari	SK tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	
9.	Peresmian Desa Sadar Hukum disertai Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum								SK tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1 bulan	Laporan pelaksanaan kegiatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi